

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awalnya perusahaan sebagai entitas bisnis bertujuan mencari laba sebanyak-banyaknya. Namun, pada perkembangannya perusahaan sebagai entitas bisnis tidak lagi bisa bersifat egoistik semata-mata mencari laba untuk kepentingan *stockholder* tetapi harus juga memperhatikan kepentingan *stakeholder* lain. Dengan kata lain berorientasi mencari keuntungan perusahaan harus tetap memperhatikan masyarakat. Dari aspek ekonomi perusahaan bertujuan mencari keuntungan sedangkan dari aspek sosial perusahaan harus memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Menurut Korten (2007) selama setengah abad terakhir ini, dunia bisnis telah menjadi institusi paling berkuasa. Setiap institusi yang paling dominan dimasyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh institusi dan setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut. Setiap tindakan korporasi membawa dampak terhadap kualitas kehidupan manusia, terhadap individu, masyarakat dan seluruh kehidupan di bumi ini. Fenomena inilah yang kemudian memicu munculnya wacana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility-CSR*). CSR bisa juga dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk kelangsungan keberadaan perusahaan dan dalam jangka panjang CSR juga dapat mendatangkan keuntungan.

Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi topic hangat yang sering dibicarakan akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dari adanya dukungan beberapa perusahaan nasional dan internasional dengan menjadikan laporan CSR bukan hanya sebagai *voluntary disclosure*, bahkan menjadikannya sebagai laporan yang diprioritaskan (Cosmin dan Eugenia, 2009). Pihak lain yang mendukung pelaporan CSR adalah pemerintah. Beberapa pemerintahan negara yang mendukung pelaporan CSR antara lain Norwegia, Swedia, Belanda, Denmark. Mengingat implikasi dari keberadaan perusahaan dirasakan oleh hampir semua makhluk hidup di dunia (Douglas, dkk 2004), dan Malaysia (Said, dkk 2009).

Menurut Syahnaz (2013) program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama CSR adalah menjadikan perusahaan tidak hanya mementingkan aspek keuangan perusahaan tetapi juga mencakup aspek kehidupan sosial serta lingkungan. Haniffa (2002) perbankkan syariah seharusnya melaksanakan CSR lebih baik dibandingkan bank konvensional dikarenakan pengukuran akuntabilitas bank syariah tidak hanya kepada para *stakeholder* tetapi juga kepada Allah SWT. sebagai pemilik alam semesta.

CSR dalam perspektif Islam menurut AAOIFI (2010), yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi keuangan Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika dan *discretionary responsibilities*. Hal ini terkait dengan tanggung jawab religius yang melekat pada bank syariah untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan syariat dalam seluruh kegiatan operasionalnya (Junaidi, 2015).

Dalam memajukan usahanya, setiap perusahaan termasuk perbankan memiliki tanggung jawab sosial terhadap publik yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnisnya meliputi aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) atau biasa disebut *triple bottom lines* (3P), yang diwujudkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Elkington, 1997).

Adanya konsep *Triple Bottom Lines* (3P), CSR dipahami sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan yang dicerminkan ke dalam *triple bottom line* “3P” yaitu *profit*, *planet*, dan *people*. Bahwa keberlangsungan hidup perusahaan hanya akan terjadi apabila perusahaan menaruh kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi, kepedulian terhadap pengembangan lingkungan dan kepedulian terhadap pengembangan sosial. Searah dengan perkembangan, perusahaan bisnis harus memberikan kontribusi terhadap tiga hal tersebut. Pada dasarnya keberlanjutan (*sustainability*) adalah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk CSR.

Konsep *triple bottom lines* (3P) kemudian lebih berkembang dengan adanya ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility*, sejak peluncuran ISO 26000 pada awal November 2010 oleh lembaga *Internasional Organization for Standardization* (ISO) komponen *triple bottom line* ditambahkan aspek prosedur (*procedure*). Hal tersebut berarti bahwa CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat.

M. Iksan et al., (2017) mengemukakan bahwa dalam dunia perusahaan perbankan seharusnya lebih memperhatikan etika dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penentu kebijakan pada pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan sosial masyarakat. Sehingga dengan berlandaskan etika Islam dianggap mampu untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan, agar dapat menjalin hubungan yang baik antara pihak perusahaan dan masyarakat sosial.

Permasalahan yang harus kita perhatikan sebagai pelaku bisnis didalam dunia usaha tidak hanya pada perusahaan umum tetapi pada perusahaan perbankan syariah yang seharusnya aktif dalam kegiatan sosial. Adanya kegiatan pengungkapan *corporate social responsibility* dalam bentuk indeks ISR yang akan menjadi langkah yang baik antara hubungan perusahaan dan masyarakat, dan langkah tersebut adalah bentuk etika dalam Islam.

Menurut Muhammad (2008), bagi umat Islam kegiatan bisnis (termasuk perbankan) tidak akan pernah terlepas dari ikatan etika syariah. Muhammad (2008) menjelaskan bahwa akuntansi syariah adalah “konsep dimana nilai-nilai Al-Quran harus dijadikan prinsip dasar dalam aplikasi akuntansi dan melakukan harmonisasi terhadap kepentingan-kepentingan baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok tertentu. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa manusia didunia sebagai *khalifatullahi fil ard* yakni melaksanakan kewajiban sebagai “wakil Tuhan” di muka bumi dengan mengolah dan memanfaatkan bumi dengan sebaik-baiknya, agar apa yang diusahakan di muka bumi ini memberikan

kemakmuran, kesejahteraan, dan kenyamanan dalam hidup bagi semua makhluk yang menghuninya.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menyatakan praktek *corporate social responsibility* perbankan syariah masih rendah dan berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh ada beberapa perbankan syariah menganggap tidak perlu menjelaskan secara rinci tanggung jawab sosialnya karena bersifat sukarela namun ada juga yang mewajibkan, sehingga standar pelaporan CSR setiap perbankan syariah tidak sama. Selain itu, tidak adanya standar baku yang merupakan masalah utama penyebab perbedaan pelaporan CSR perbankan syariah dan standar dalam melakukan penilaian masih menggunakan standar konvensional seperti indeks GRI yang belum tentu sesuai untuk bank syariah. Peneliti menduga hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut disebabkan oleh luasnya tolak ukur yang digunakan dalam pelaporan CSR yang diteliti. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pengukuran indeks yakni: Sangat Informatif (81%-100%), Informatif (66%-80%), Kurang Informatif (51%-65%), dan Tidak Informatif (0%-50%).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks*.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian sejatinya memberikan manfaat yang berguna bagi pembaca. Untuk itu besarnya harapan peneliti terhadap hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dari segi pemikiran terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam akuntansi syariah terutama CSR.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan nilai-nilai makna CSR bagi perusahaan perbankan dan nilai tambah syariah di dalam perusahaan.
- c. Penelitian ini memberikan andil dalam memperkaya beberapa hasil penelitian sebelumnya.
- d. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa makna CSR bagi perusahaan bukan hanya dipandang sebagai kewajiban, namun terdapat nilai lebih di dalamnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diterapkan dalam memperbaiki praktik yang sudah ada adalah:

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai regulasi yang mengatur pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah sehingga dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab sosial perbankan syariah bukan hanya berupa aspek moral, materi dan etika melainkan ada aspek spiritual yang terkandung didalamnya.
- c. Bagi bank syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menjadikan *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai acuan dan tolak ukur yang memadai dalam melaksanakan dan mengungkapkan tentang tanggung jawab sosial.
- d. Bagi peneliti dan mahasiswa, penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan syariah dan juga dapat terus dikembangkan dan dijadikan sebagai acuan penelitian berikutnya.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada bank syariah yang laporan tahunannya diumumkan baik melalui *website* perusahaan.

2. Penelitian ini dilakukan pada 2014-2018 dengan menggunakan data laporan tahunan dari masing-masing bank.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

2. **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain pengertian, jenis CSR, tujuan dan manfaat CSR, konsep CSR berdasarkan prinsip syariah, serta pengungkapan CSR perbankan syariah dari segi ISR.

3. **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai desain penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis data.

4. **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian dan analisis tentang pembahasan pengungkapan tanggung jawab sosial dan implikasinya terhadap nasabah, masyarakat, lingkungan, negara dan perbankan syariah itu sendiri. Selanjutnya penulis membahas tentang tanggung jawab sosial perbankan syariah dari segi perspektif Islamic Social Reporting (ISR).

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini, implikasi penelitian dan saran penelitian berdasarkan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Pengungkapan CSR ada beberapa teori yang digunakan salah satunya menurut Rokhlinasari (2016) teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin kegiatan mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini yang diharapkan publik. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat ‘kontrak sosial’ antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya yaitu merupakan kontrak sosial. Harapan sosial ini tidak tetap namun berubah seiring berjalannya waktu yang menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan dimana mereka beroperasi.

Jika perusahaan merasa bahwa legitimasinya dipertanyakan maka dapat mengambil beberapa strategi perlawanan, yaitu: 1) Perusahaan dapat berusaha untuk mendidik dan menginformasikan kepada *stakeholder*-nya mengenai perubahan yang terjadi dalam perusahaan. 2) Perusahaan dapat berupaya untuk merubah pandangan *stakeholder* tanpa mengganti perilaku perusahaan. 3) Perusahaan dapat berupaya untuk memanipulasi persepsi *stakeholder* dengan cara

mengalihkan perhatian *stakeholder* dari isu yang menjadi perhatian kepada isu lain yang berkaitan dan menarik. 4) Perusahaan dapat berusaha untuk mengganti dan mempengaruhi harapan pihak eksternal tentang kinerja (*performance*) perusahaan.

Teori legitimasi, organisasi harus secara berkelanjutan menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial. Hal ini sering kali dapat dicapai melalui pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan perusahaan. *Disclosure* dapat digunakan untuk mendemonstrasikan perhatian manajemen akan nilai sosial, atau untuk mengarahkan kembali perhatian komunitas akan keberadaan pengaruh negatif aktifitas organisasi. Beberapa studi terdahulu melakukan penilaian atas pengungkapan lingkungan sukarela laporan tahunan dan memandang pelaporan informasi lingkungan dan sosial sebagai metode yang digunakan organisasi untuk merespon tekanan publik.

Organisasi atau perusahaan akan terus berkelanjutan keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri yang merupakan dasar pemikiran dari teori legitimasi. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja dapat diterima dimasyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal ini dapat

membantu atau mendorong investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

2.1.2 Teori Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan (Hadi, 2011). Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholder*). Sebagaimana terjadi selama ini, namaun bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai lingkup sosial kemasyarakatan (*stakeholder*). Tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal.

Hakikat teori *stakeholder* tersebut diatas jika ditarik interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi *expectation gap* dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang merah. Untuk itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan *economic measurement* yang cenderung *shareholder orientation*, kearah memperhitungkan faktor sosial (*social factors*) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (*shareholder orientation*). Apalagi pada bank syariah yang berlandaskan syariah Islam dengan konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan dalam Islam terdapat dalam surah Al-Isra: 35 dan Al-Baqarah 205.

QS. Al- Isra ayat 35

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Q S. Al- Baqarah ayat 205

الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
فِيسَعَتْنَ لَوْ إِذَا
الْفَسَادَ

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.

2.2 Pengungkapan (*Disclosure*)

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menyembunyikan atau tidak menutupi. Jika dikaitkan dengan laporan keuangan *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memiliki data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan.

Evans (2003) dalam Suwadjono (2013) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan menurut para akuntansi member pengertian secara terbatas yaitu penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan didalam laporan keuangan biasanya laporan tahunan. Sedangkan dalam arti luas berarti penyampaian (*release*) informasi.

Laporan tahunan (*Annual Report*) media utama penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan tahunan mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki dan laporan pelengkap. Sehingga dalam laporan tahunanlah diketahui seberapa kuat informasi pengungkapan yang diajukan oleh perusahaan. Laporan tahunan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor, dan *stakeholder* lainnya.

Secara umum, ada tiga konsep pengungkapan (Hendriksen dan Breda 1992 dan Evans 2003). Ketiga konsep pengungkapan ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan berapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Konsep tersebut antara lain:

1. Pengungkapan cukup (*adequate disclosure*) adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.
2. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*) adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapat informasi yang sama.
3. Pengungkapan penuh (*full disclosure*) menuntut penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.

2.2.1 Jenis- Jenis *Disclosure*/ Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan

Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, ukuran alternatif, metode

persediaan jumlah saham yang beredar dan kontijensi, misalnya pos-pos yang dicatat berdasarkan *historical cost*. Menurut Darrough dan Russell (2002) dua jenis pengungkapan yang digunakan perusahaan untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* berupa:

2.2.1.1 Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan ini merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), namun sebelum dikeluarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai laporan tahunan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah meliputi semua pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

2.2.1.2 Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Perusahaan akan melakukan pengungkapan melebihi kewajiban pengungkapan minimal jika mereka merasa pengungkapan semacam itu akan menurunkan biaya modalnya atau jika mereka tidak ingin ketinggalan praktik-praktik pengungkapan yang kompetitif. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan akan mengungkapkan lebih sedikit apalagi mereka merasa pengungkapan keuangan akan menampakkan rahasia kepada pesaing atau menampakkan sisi buruk perusahaan didepan berbagai pihak.

Adanya pengungkapan sukarela ini maka upaya untuk berkomunikasi secara efektif dengan pembaca-pembaca asing, karena tidak adanya standar akuntansi dipelaporan yang diterima secara internasional. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar dari apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi ataupun peraturan badan pengawas.

2.2.2 Metode Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan meliputi keseluruhan proses pelaporan. Pemilihan metode yang terbaik dari pengungkapan pada setiap kasus tergantung pada sifat informasi yang bersangkutan dan kepentingan relatifnya. Namun demikian ada beberapa metode yang berbeda dalam mengungkapkan informasi yang dianggap penting. Metode yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bentuk dan susunan laporan yang formal.
- b. Terminologi dan penyajian yang terperinci.
- c. Informasi sisipan
- d. Catatan kaki
- e. Ikhtisar tambahan dan skedul-skedul.
- f. Komentar dalam laporan auditor.
- g. Pernyataan Direktur Utama atau Ketua Dewan Komisaris.

2.3 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas,

bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya (Wibisono 2007). Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki manfaat bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, negara, dan para pemangku *Stakeholder* lainnya. Wibisono (2007) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya:

Bagi perusahaan, perusahaan yang melakukan CSR akan memperoleh empat manfaat, yaitu: (1) keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan serta perusahaan mendapat citra yang positif dari masyarakat luas; (2) perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*); (3) perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas dan; (4) perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diharapkan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktik CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. Dan bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya. Serta bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau mal praktik bisnis seperti

penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

2.3.1 Tujuan CSR

Tujuan CSR diantaranya yaitu pertama, perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang terkadang bersifat ekspansif atau eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan pada masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan, mendongkrak citra dan performa perusahaan. Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Konflik itu bisa berasal dari dampak operasional perusahaan atau akibat yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

2.3.2 Manfaat CSR

Artikel yang berjudul *Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspectives*, Branco dan Rodrigues (2006) dalam Ismayanti (2015) membagi manfaat CSR bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari sebuah perusahaan, yaitu dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, manfaat itu meliputi beberapa hal. Pertama, pengembangan aktivitas

yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Serangkaian aktivitas pengembangan sumber daya manusia dicapai dengan menciptakan para karyawan yang memiliki keterampilan tinggi. Karyawan yang berkualitas akan menyumbangkan pada sistem manajemen sumberdaya manusia yang lebih efektif. Misalnya, dengan meningkatnya loyalitas dan moral dari karyawan.

Kedua, adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan *supplier* yang berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatkan performa lingkungan perusahaan. Adapun bentuk-bentuk aktivitas yang dapat dilakukan, antara lain penggunaan bahan baku yang didaur ulang atau dapat dipakai kembali dan mengganti bahan baku produksi yang kurang ramah lingkungan.

Ketiga, menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi yang baik. Pengenalan CSR diharapkan akan memunculkan komitmen karyawan yang kuat terhadap perusahaan dan kemauan untuk belajar. Selain itu partisipasi para karyawan di dalam perusahaan dan keterampilan mereka diharapkan dapat meningkat.

Keempat, meningkatnya kinerja keuangan, dimana dengan dilakukannya CSR, kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah *go public*, menjadi lebih baik. Misalnya, riset yang dilakukan oleh Al-Tuwaijri bersama kawan-kawan, yang menguji hubungan antara tiga variabel, yakni pengungkapan tanggung jawab terhadap lingkungan yang merupakan salah satu unsur CSR, kualitas lingkungan, dan kinerja ekonomi perusahaan pada 531

perusahaan yang terdaftar di Wall Street pada 1994, menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara ketiga variabel tersebut.

Selain mendapatkan manfaat internal, terdapat beberapa manfaat eksternal dari penerapan CSR bagi suatu perusahaan. Pertama, penerapan CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggungjawaban secara sosial. Reputasi perusahaan yang baik akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Selain itu, juga akan meningkatkan ketertarikan investor kepada perusahaan tersebut, serta memperluas jaringan bisnis dan mengurangi risiko bisnis. Kedua CSR merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Untuk itu, diperlukan kesesuaian antara berbagai aktivitas sosial, dengan karakteristik perusahaan yang juga khas. Ketiga, melaksanakan CSR dan membuka kegiatan CSR, merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka perusahaan dapat membangun reputasi dan *image* yang baik.

2.4 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* (Mathew, 1995) atau *corporate social responsibility* (Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap

masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas di banding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Gray et al., 1988 dalam Sembiring 2005).

Undang- undang No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan. Namun demikian, item-item CSR yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang masih bersifat sukarela (*voluntary*). Menurut Gray, Owen, dan Maunders (1988), tujuan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

- a. Untuk meningkatkan *image* perusahaan.
- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas suatu organisasi, dengan asumsi bahwa terdapat kontrak sosial antara organisasi dengan masyarakat.
- c. Untuk memberikan informasi kepada investor.

Selain menurut Zadox (1998) dalam Sulistyowati (2004), alasan perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial adalah:

- a. Untuk memahami apakah perusahaan telah mencoba mencapai kinerja sosial terbaik sesuai yang diharapkan.
- b. Untuk mengetahui apa yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kinerja sosial.

- c. Untuk memahami implikasi dari apa yang dilakukan perusahaan tersebut.

Darrough (1993) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004), mengemukakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh lembaga yang berwenang (Pajak, Undang-Undang, SAK maupun BAPEPAM). Jika perusahaan tidak tersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya. Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan, mencakup lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan kerja, tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum (Hackston dan Milne, 1996).

Menurut Gray et al., (1995) dalam Sembiring (2003) ada dua pendekatan yang secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mungkin diperlukan sebagai suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat keuangan sebagai pemakai utama pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan cenderung membatasi persepsi tentang tanggung jawab sosial yang dilaporkan. Pendekatan alternatif kedua dengan meletakkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran

informasi dalam hubungan masyarakat dan organisasi. Pandangan yang lebih luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan dalam pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Komitmen perusahaan dalam melaksanakan, menyajikan, dan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang diperoleh perusahaan adalah (1) profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan akan semakin kokoh; (2) meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok, dan konsumen; (3) meningkatnya komitmen etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan; (4) menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi komunitas sekitar karena merasa diperhatikan dan dihargai perusahaan; (5) meningkatnya reputasi, *corporate branding*, *goodwill (intangible asset)* dan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Lako, 2010).

Gray et al. (2001) dalam Rakhiemah dan Agustia (2009) menyatakan bahwa *CSR disclosure* merupakan suatu proses penyedia informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar *social accountability*, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan yang berorientasi sosial. Pengungkapan CSR merupakan pengungkapan suatu informasi aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan yang diharapkan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

2.5 Konsep CSR Berdasarkan Prinsip Syariah

Ada perbedaan mendasar antara konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif konvensional (*western*) dan Islam. CSR dalam konsep Islam tidak bisa dilepaskan dari konsep Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara CSR dalam konsep barat sangat berbeda dengan konsep Islam yang mengembangkan konsep CSR kadang tidak lepas dari kepentingan perusahaan itu sendiri (bias CSR). Ada beberapa hal yang terpenting dalam *sosial reporting* menurut perspektif Islam (Maali, 2006) sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, sangat dipengaruhi oleh hubungan antara individu dan perusahaan dengan Allah SWT. Hal ini didasarkan konsep dasar Islam yaitu Tauhid (keesaan Allah SWT). Konsep keesaan Allah SW. ini menegaskan bahwa segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan hanya kepada Allah SWT. dan sesuai dengan perintah-Nya.
2. Keadilan sosial, merupakan hal yang penting dalam *Islamic Social Reporting* (ISR). Keadilan yang dimaksud adalah berlaku adil kepada siapapun karena sesama muslim adalah bersaudara. Selain itu juga seorang muslim tidak boleh melakukan eksploitasi dan tindakan yang dapat merugikan sesama.
3. Kepemilikan, Islam mengakui adanya kepemilikan individu, namun perlu diketahui bahwa kepemilikan tersebut bukan kepemilikan yang absolut karena segala sesuatu didunia ini adalah milik Allah SWT.

Menurut Sofyani et al. (2012) konsep CSR juga ada dalam ajaran Islam. Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya

mendasarkan pada filosofi dasar Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Oleh karenanya ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungan dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional. Hal ini didasarkan pada lembaga bisnis syariah didasarkan pada dasar-dasar religius.

Dari segi prinsip hubungan yang mengatur hubungan sesama makhluk hidup, dalam Islam telah digambarkan adanya hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan pencipta-Nya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, *rahmatanlil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan *maslahah* (kepentingan masyarakat) (Dusuki,2007,2008):

1. Konsep berbagi dengan adil, dinyatakan dalam banyak perintah Allah melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsep ini, mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Allah yang lain.
2. Prinsip *rahmatanlil'alamin* berarti bahwa keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya dan manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam bentuk pemberian zakat, sedekah dan pengembangan ekonomi masyarakat.
3. Prinsip *Maslahah* (Kepentingan Masyarakat). Prinsip masalah disini adalah dimanapun bank syariah berada dapat memberikan dampak yang positif bukan hanya kepada masyarakat sekitarnya tetapi seluruh

makhluk sesuai dengan prinsip filosofi islam bahwa manusia merupakan wakil Allah didunia.

Perusahaan yang berdasarkan prinsip Islam bertujuan ingin menyelaraskan antara kegiatan ekonomi (keuangan) dan spiritual, setiap kegiatan perusahaan tidak terlepas dari prinsip dan nilai-nilai syariah Islam yang memiliki tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu mencari ridho Allah sebagai tujuan utama dalam membangun keadilan sosial ekonomi, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mencapai kesejahteraan (Haniffa,2002 dan Dusuki, 2007, 2008).

Oleh sebab itu, dalam melaksanakan usahanya bank syariah harus sesuai prinsip syariah yang berdasarkan ketiga dimensi tersebut. Selain itu, dengan adanya pengungkapan pelaporan sosial ini berarti sebuah perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip *transparancy*, *accountability*, dan *responsibility* yang sesuai konsep tata kelola perusahaan.

2.6 Islamic Social Reporting Indeks (ISR)

2.6.1 Praktik dan Pengungkapan ISR

Praktik dan pengungkapan ISR pada perusahaan dimana menurut Haniffa dan Hudaib (2004) serta Baydoun dan Willet (2000) pengungkapan itu membuat sesuatu dapat diketahui baik itu yang bersifat wajib maupun sukarela serta tingkat pengungkapan sangat dipengaruhi oleh sumber pembiayaan, keadaan ekonomi dan politik, sistem hukum, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya.

Menurut Sulaiman (2001) agama secara umum mempengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat serta prinsip-prinsip kehidupan mereka termasuk

didalamnya kegiatan bisnis, akuntansi dan keuangan. Pengungkapan (*disclosure*) penuh sesuai dengan filosofi agama Islam dan mempengaruhi pengguna eksternal untuk membuat keputusan ekonomi dan agama. Pengungkapan (*disclosure*) menurut pandangan Islam terdiri dari dua bagiannya itu akuntabilitas sosial dan konsep pengungkapan penuh (Baydoun dan Willet, 2000; Haniffa dan Hudaib, 2004).

Menurut Haniffa (2002), *Islamic Social Reporting (ISR)* memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual para penggunanya dan para pembuat keputusan dan sebagai bahan pertimbangan tentang kegiatan operasional perbankan syariah yang bersangkutan. sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat.

Menurut Maali (2006) dan Abu-Tapenjeh (2009) dalam ekonomi Islam, akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar dan adil serta transparan. Akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT karena semua tindakan akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Konsep dasar akuntabilitas menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip berbagi dengan adil, *rahmatanlil alamin* dan *maslahah* (kepentingan masyarakat). Oleh karena itu, pengungkapan fakta keuangan dan non keuangan harus berisi informasi yang benar, akurat, dan tersedia bebas untuk penggunanya.

Maali, et al. (2006) juga mengungkapkan dari segi prinsip hubungan yang mengatur hubungan sesama makhluk hidup. Prinsip-prinsip tersebut adalah dengan berbagi dengan adil, melalui zakat, infak, dan sedekah, prinsip

rahmatanlil alamin yaitu keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Jika dikaitkan dengan kerangka bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak dan prinsip *maslahah* (kepentingan masyarakat).

2.6.2 Islamic Social Reporting (ISR) di Lembaga Keuangan Islam

Lembaga keuangan yang berdasarkan syariah idealnya lebih memperhatikan tanggung jawab sosialnya. Menurut Karim (2006), bank syariah yang tentunya berasaskan Islam memiliki 3 (tiga) aspek utama yakni aspek aqidah, aspek syariah, dan aspek akhlak yang selalu diterapkan dalam aktivitas dan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah dan sebagai pertanggungjawabannya kepada Allah SWT.

Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) dan Hameed (2007) perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional terletak pada filosofi dan nilai-nilai Islam, fungsi sosial dalam bentuk zakat dan semua kegiatannya dinilai oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), investasi dan jasa keuangan yang sesuai dengan syariat Islam,. Oleh karena itu, perbankan syariah sebagai lembaga keuangan dan sosial harus melaksanakan semua aspek tersebut sebagai etika bisnis dan etika syariah dalam setiap kegiatan bisnis mereka.

Di Indonesia secara teknis perbankan syariah diatur dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memuat garis besar visi misi perbankan syariah dengan harapan perbankan syariah

memberikan dampak dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan perbankan konvensional memberdayakan ekonomi umat dengan transparansi, memberikan return yang lebih baik, mendorong pemerataan pendapatan, mendorong penurunan spekulasi, peningkatan efisiensi mobilisasi dana dan *uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

2.7 Penelitian Terdahulu

Hingga saat ini telah dilakukan banyak penelitian mengenai CSR yang dilakukan di perusahaan perbankan. Penelitian- penelitian ini meneliti tentang CSR pada industri perbankan dari berbagai sudut pandang, mulai dari motivasi dan praktik tanggung jawab sosial, media pengungkapan CSR disektor perbankan. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan motivasi, praktik, media pengungkapan, serta hal-hal yang mempengaruhi praktik dan pengungkapan CSR oleh perusahaan perbankan:

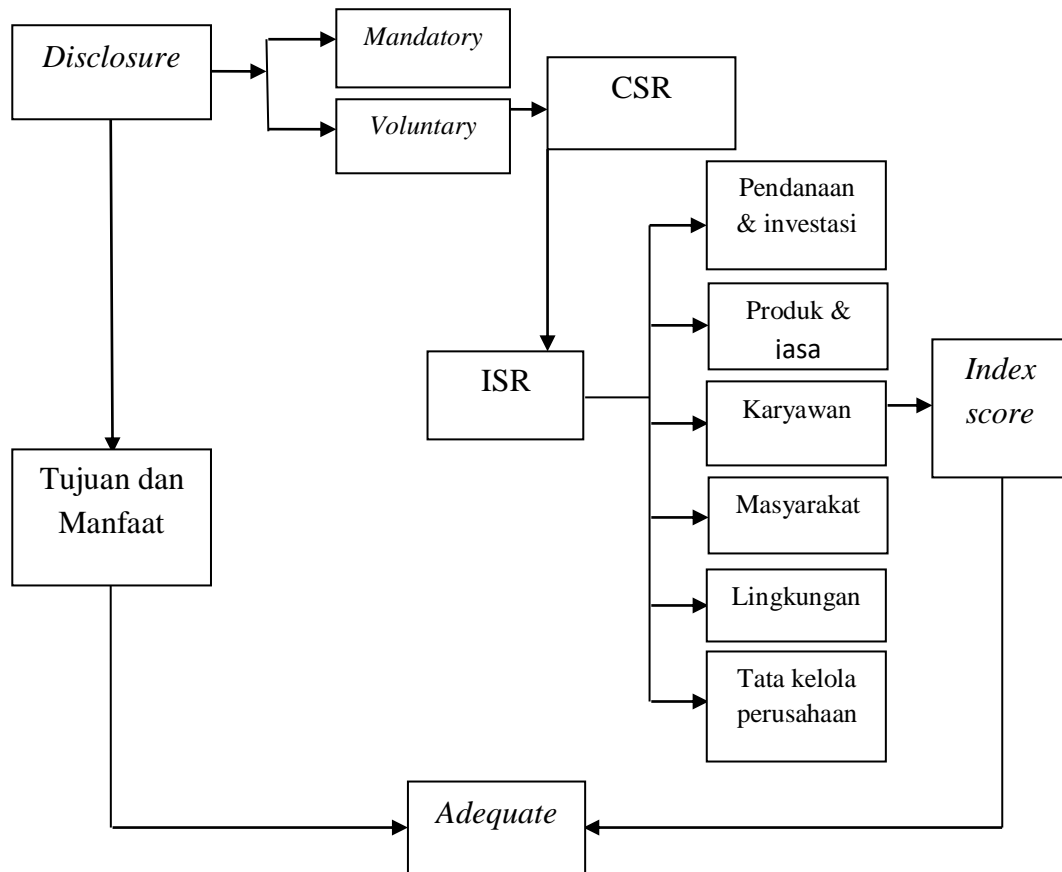
Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Soraya Fitria dan Dwi Hartanti (2010)	Islam Dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan <i>Global Reporting Initiative Indeks</i> Dan <i>Islamic Social Reporting Indeks</i>	Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga perbankan konvensional pada umumnya mendapat nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan institusi perbankan syariah. Meski beberapa daerah lembaga perbankan islam terkemuka. Soraya dkk (2010) menemukan bahwa untuk institusi perbankan syariah, skor yang diambil dari indeks inisiatif pelaporan global lebih tinggi dari pada skor yang diambil dari indeks pelaporan sosial islam. Soraya dkk (2010) juga memperhatikan bahwa pelaporan sosial islam masih dalam tahap pengembangan di Indonesia. Namun, Soraya dkk (2010) dapat memprediksikan bahwa indeks pelaporan sosial islam akan umum digunakan di masa akan datang.
2.	Citra Indah Merina Verawaty (2016)	Analisis Komparasi <i>Indeks Islamic Social Reporting</i> Perusahaan Perbankan Syariah Dan Perusahaan Go Publik Yang <i>Listing</i> Di <i>Jakarta Islamic Index</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan syariah menggunakan lebih banyak berdasarkan indeks ISR daripada perusahaan yang <i>listing</i> di JII. Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa pengungkapan yang benar-benar beroperasi dengan konsep syariah karena perusahaan perbankan syariah memang lebih baik memenuhi indeks ISR daripada perusahaan konvensional yang <i>listing</i> di JII.
3.	Sofyani, Ihyaul Ulum, Daniel Syam, Sri Wahjuni (2012)	<i>Islamic Social Reporting Index</i> Sebagai Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja social secara keseluruhan rata-rata perbankan syariah di Malaysia lebih tinggi dari Indonesia. Ketika diuji secara statistik, perbedaan ini tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Selain itu, ada perbedaan non-islamic di Indonesia dan Malaysia yang mencapai tingkat sempurna (100%) antara kinerja sosial dari ISR dan Indeks GRI.
4.	Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho.J (2015)	Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan <i>Islamic Social Reporting Index</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia dalam hal pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> berdasarkan Indeks <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> sudah cukup optimal.
5.	Junaidi (2015)	Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan <i>Islamic Social Reporting Index</i>	Analisis <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> dilakukan dengan merujuk pada laporan tahunan 2014 yang diterbitkan oleh masing-masing bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMI, BSM dan BNIS mencetak 91 tertinggi% dan skor terendah adalah BRIS mencetak 54%.

6.	Rania Kamla dan Hussain G. Rammal (2013)	Social reporting by Islamic banks: does social justice matter?	Pengungkapan bank syariah menekankan karakter keagamaan mereka melalui klaim bahwa mereka mematuhi ajaran Syariah. Namun, pengungkapannya tidak memiliki informasi spesifik atau terperinci mengenai skema atau inisiatif berhadapan dengan pengentasan kemiskinan atau meningkatkan keadilan sosial.
7.	Elisa Aracil (2019)	Corporate social responsibility of Islamic and conventional banks: The influence of institutions in emerging countries.	Dalam lingkungan kelembagaan yang sama, bank Islam dan non-Islam menggabungkan model konvergen dan divergen untuk mengakomodasi realitas kelembagaan dalam kebijakan CSR mereka. Bank syariah menunjukkan komitmen implisit untuk CSR yang sebagian besar didasarkan pada lembaga informal, sedangkan bank konvensional menggunakan strategi CSR eksplisit sebagai sarana untuk mengisi kekosongan di lembaga formal. Selain itu, CSR-filantropi yang berorientasi pada kesejahteraan bank-bank Islam, terkait dengan tindakan CSR yang terkait dengan bisnis inti yang diikuti oleh bank konvensional.
8.	Ali Rama (2014)	Analisis Determinasi Pengungkapan Islamic Social Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia.	Penelitian ini juga menemukan bahwa bank syariah mengalami peningkatan rata-rata indeks pengungkapan ISR selama periode penelitian. Akan tetapi, pengungkapan ISR bank syariah baru memenuhi sekitar 50 persen dari keseluruhan item pengungkapan yang harus di-disclosure berdasarkan pada model yang dikembangkan pada penelitian ini.
9.	Muhammad Adnan Khurshid, Abdulrahman Al-Aali and Ahmed Ali Soliman, Salmiah Mohamad Amin (2014)	Developing an Islamic corporate social responsibility model (ICSR).	Studi ini memperluas teori Carroll (1979) menggunakan definisi operasional CSR yang mencakup dimensi ekonomi, hukum, etika dan filantropis CSR dari perspektif Islam. Model ICSR ini berlaku untuk sistem bisnis Islam dan non-Islam karena CSR Islam dan Barat memiliki dasar kemanusiaan yang sama.
10.	Resa Saridona Dan Martha Fani Cahyandito (2015)	Social Performance of Indonesia Islamic Banking: Analysis of Islamic Social Reporting Index	Hasil analisis menunjukkan bahwa, secara umum, kinerja sosial bank syariah Indonesia, yang terdapat dalam laporan tahunan 2013, berada dalam kategori 'baik' (secara statistik terpenuhi 61,73% dari keseluruhan indeks kinerja sosial). Dari seluruh populasi bank syariah di Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM) diakui dengan peringkat tertinggi menggunakan Islamic Social Reporting Index. Sementara itu, Islamic Victoria Bankis masuk dalam peringkat terakhir dengan predikat yang memadai.

2.8 Kerangka Teori

Berdasarkan uraian teori tentang *disclosure*, CSR, dan teori yang menggabungkan keduanya serta teori tentang indeks ISR maka dapat digunakan gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Teori

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djam'an (2011) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantitatifkan yang bersifat dekriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Sugiyono (2012) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang didasari pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Sukmadinata (2011) penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian dekriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-

satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif *content analysis*. Peneliti memaparkan secara mendalam laporan pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah. Kemudian, peneliti membandingkan pengungkapan tersebut dengan kriteria yang ada di *Islamic Social Reporting* (ISR). Setelah itu, peneliti mengevaluasi kesesuaiannya antara pengungkapan dengan visi misi perbankan syariah dan memberikan penilaian serta pembahasan dari setiap pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut sesuai dengan item yang ada di *Islamic Social Reporting* (ISR) tersebut.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sebagai instrumen yang mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, serta mencari kesempatan dan mencari respon (Moleong, 2014). Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan langsung dengan responden atau objek lainnya. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisi data, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti sebagai pelapor hasilnya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada perbankan syariah di Indonesia yang berfokus pada Bank Umum Syariah yang telah mempublikasikan laporan

tahunan (*annual report*). Objek pada penelitian ini adalah 12 Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode 2014-2018.

3.4 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud ini adalah data yang diambil dari situs web resmi masing-masing bank umum syariah.

3.5 Tema Dan Sub Tema Yang Diteliti

Haniffa dan Hudaib (2004 dan 2007) mengungkapkan bahwa dalam konteks institusi keuangan Islam terdapat dua jenis kontrak, yaitu kontrak eksplisit dan implisit. Kontrak eksplisit berupa hubungan antara perusahaan dengan berbagai pihak dalam bentuk dokumen yang ditandatangani. Sedangkan kontrak implisit berupa memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, melindungi dan memperbaiki lingkungan, pengembangan masyarakat dan sosial.

Standar penilaian kontrak implisit perbankan syariah yang digunakan adalah *Islamic Social Reporting* (ISR). Penelitian ini akan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang digunakan oleh Haniffa (2004) dan Othman et al. (2009) dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan menurut karakteristik dan kebutuhan penelitian ini hal yang substansi yang perlu diungkapkan oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah dan perlu untuk diketahui oleh penggunaannya serta yang banyak dijadikan bahan kritik terhadap perbankan syariah dan dijadikan riset oleh peneliti terdahulu.

Tabel 3.1 Tema dan Sub Tema ISR yang diteliti

No.	Tema	Sub Tema
1.	Pendanaan dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas riba - Gharar - Zakat - Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>Insolvent clients</i>. - Kebijakan investasi - Kebijakan pembiayaan
2.	Produk dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Status halal atau syariah dalam produk - Jenis dan definisi produk - Keluhan pelanggan/ kejadian yang timbul karena ketidakpastian terhadap peraturan yang berlaku.
3.	Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik pekerjaan - Pendidikan dan pelatihan - Kesempatan yang sama - Kesehatan dan keselamatan kerja - Tempat ibadah yang memadai.
4.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Shadaqah/ donasi - Wakaf - Qard hasan - Sumbangan dari karyawan atau nasabah - Pendidikan - Bantuan kesehatan - Pemberdayaan ekonomi - Kepedulian terhadap anak yatim piatu - Pembangunan dan renovasi masjid - Kegiatan kepemudaan - Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik barang, dan lain-lain) - Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain.
5.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye <i>go green</i> - Konservasi lingkungan - Perlindungan terhadap flora dan fauna yang liar atau terancam punah. - Polusi - Perbaikan dan pembuatan sarana umum - Audit lingkungan - Kebijakan manajemen lingkungan
6.	Tata Kelola Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pernyataan tentang kpatuhan syariah (DPS) - Struktur kepemilikan - Pendapatan dan penggunaan dana non-halal - Kebijakan anti-korupsi - Kinerja DPS - Rincian nama dan profil DPS - Kinerja komisaris - Rincian nama dan profil komisaris - Kinerja direksi - Rincian nama dan profil dewan direksi

Salah satu bentuk akuntabilitas kegiatan lembaga keuangan syariah dalam perspektif Islam adalah pelaporan *corporate social responsibility* yang sesuai

dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan *corporate social responsibility* dikenal sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas terkait dengan peran masyarakat dalam ekonomi maupun kegiatan bisnis perusahaan.

Prinsip-prinsip syariah tidak hanya berisi konsep-konsep etika dalam perspektif Islam, tetapi juga berisi berbagai macam pedoman yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti ekonomi dan sosial. Sesuai dengan tabel 3.1 di atas. *Islamic Social Reporting* (ISR) berada pada lingkup aspek ekonomi atau secara lebih spesifik berada lingkup aspek akuntansi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *Islamic Social Reporting* merupakan kerangka pelaporan *corporate social responsibility* perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan *Corporate Social Responsibility* perusahaan bisnis syariah. Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan indeks ISR, yaitu tema pendanaan dan investasi, tePRODUK dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Kemudian kembali dikembangkan oleh Othaman et al. (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema tata kelola perusahaan.

Penjelasan mengenai tema-tema yang menjadi bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan dan investasi (*Finance & Investment*)

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal, dan wajib. Informasi dalam tema pendanaan dan investasi antara lain *interest-free* (bebas

riba) dan *speculative-free* (bebas gharar). Kegiatan yang mengandung riba dalam Islam sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279. Salah satu bentuk riba di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga (Gustani, 2015).

Sama halnya dengan riba, gharar juga dilarang dalam Islam. Gharar merupakan ketidakpastian yang terjadi akibat *incomplete information* dalam empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contoh salah satu dari transaksi yang mengandung gharar adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli), karena adanya ketidakjelasan antara transaksi sewa atau beli yang sebenarnya berlaku (Karim, 2004 dalam Gustani, 2015). Ketidakjelasan inilah yang menyebabkan transaksi sejenis ini dilarang seperti jual beli valuta asing bukan transaksi komersial (*arbitrage*) baik spot maupun *forward*, melakukan *pure swap*, *capital lease*, *future*, *warrant*, *option*, dan transaksi derivatif lainnya, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*short selling*) (Arifin, 2009 dalam Raditya, 2012).

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah praktik pembayaran zakat. Zakat merupakan kewajiban perusahaan berbasis syariah untuk mengeluarkan zakat dari keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi perusahaan syariah dapat menggunakan dua metode. Metode pertama, dasar perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode *net worth* (kekayaan bersih).

Artinya seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Metode kedua, dasar perhitungan zakat adalah keuntungan dalam setahun (Hakim, 2011 dalam Gustani, 2015).

Kebijakan atas keterlambatan pembayaran pembiayaan oleh debitur sesuai dengan filosofi lembaga keuangan yang berbasis syariah dimana salah satu prinsipnya adalah tolong menolong kepada masyarakat (bukan hanya muslim). Dalam Islam, manusia sangat dianjurkan untuk dapat hidup rukun dan saling tolong menolong tidak terkecuali dalam hal utang-piutang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 berikut:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

2. Produk dan Jasa (*Product and Services*)

Menurut Othman et al. (2009) dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru. Beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen.

Badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah atau sering disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar

tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Anggota DPS harus terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan (Gustani, 2015). Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini hampir seluruh unit bisnis mengedepankan aspek pelayanan terbaik yang mereka berikan akan berdampak pada tingkat loyalitas konsumen atau nasabah.

3. Karyawan (*Employees*)

Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika dan keadilan. Menurut Haniffa (2002) dan Othman dan Thani (2010) menjelaskan bahwa masyarakat muslim ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan. Beberapa informasi yang berkaitan dengan karyawan menurut Haniffa (2002) dan Othman et al. (2009) diantaranya karakteristik pekerjaan, pendidikan dan pelatihan karyawan, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

4. Masyarakat (*Social Community Involment*)

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah ummah, amanah, dan 'adl. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Islam mengharuskan kepada umatnya untuk saling tolong menolong antar sesama. Bentuk saling

berbagi dan tolong menolong bagi bank syariah dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, dan qardh. Jumlah serta pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah (Gustani, 2015). Hal ini merupakan salah satu fungsi bank syariah yang diamanahkan oleh Syariat dan Undang-Undang.

Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah sedekah, wakaf, dan pinjaman kebajikan (qardh) (Haniffa, 2002). Sedangkan beberapa aspek lainnya yang dikembangkan oleh Othman et al. (2009) diantaranya adalah sumbangan dari karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kegiatan kepemudaan, dan kegiatan sosial lainnya.

5. Lingkungan Hidup (*Enviroment*)

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khalifah*, dan akhirah. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhaaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan (Gustani, 2015). Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi, kemudian ditegaskan pula oleh Othman dan Thani (2010) perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam setiap jenis kegiatan yang mungkin merusak atau membahayakan lingkungan hidup. Dengan demikian informasi yang terkait dengan penggunaan sumber daya dan program yang dilakukan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan.

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan hidup diantaranya kampanye *go green*, konservasi lingkungan, tidak membuat polusi lingkungan hidup, audit lingkungan, perbaikan dan pembuatan saran umum, perlindungan terhadap flora dan fauna yang terancam punah, dan kebijakan manajemen lingkungan (Haniffa 2002; Othman et al., 2009; Fauziah dan Yudho, 2013).

6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khalifah. Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan dari Othman et al. (2009). Dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Secara formal *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan *stakeholder*. Menurut Muhamad (2005) dalam Gustani (2015) *corporate Governance* bagi perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturanyang khas yaitu hukuman syariat dan harapan kaum muslim.

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan syariah, struktur kepemilikan, pendapatan dan penggunaan dana non-halal, kebijakan anti korupsi, kinerja DPS,

komisaris, dan dewan direksi, serta rincian nama dan profil DPS, komisaris dan dewan direksi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan melalui strategi arsip. Strategi arsip yang dilakukan adalah dengan *content analysis* (analisis isi). Othman et al. (2009) menggunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi jenis pengungkapan ISR dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis laporan tahunan perusahaan. Jenis pengungkapan ISR tersebut dikodekan ke dalam *coding sheet*. Karakteristik pengungkapan dalam bentuk kata, gambar, kalimat, atau grafik dikodekan sesuai dengan tema pengungkapannya. Sedangkan Kolbe dan Burnett (1991) dalam buku Sekaran dan Bougie (2016) menjelaskan bahwa metode penelitian observasional yang digunakan secara sistematis untuk mengevaluasi isi simbolis dari seluruh bentuk komunikasi yang tercatat merupakan metode *content analysis*

3.7 Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang subjektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting melalui data *kredibilitas* (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat dipercaya. Menurut Moleong (2009) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*keadibilitas*), keteralihan (*transferabilitas*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*).

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian keabsahan data dengan triangulasi. Jenis triangulasi yang digunakan yaitu, triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain menggunakan arsip, dokumen tertulis, dokumen sejarah, catatan atau tulisan pribadi, dan gambaran atau foto peneliti, dapat juga melalui wawancara. Dari arsip atau dokumen tertulis tersebut akan menghasilkan bukti atau informasi yang berbeda yang akan memberikan pandangan (*insight*) yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

3.8 Analisis Data

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain yang merupakan teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam item-item, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2007).

Bogdan & Biklen (1982) menyatakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain merupakan teknik analisis data (Moleong,2007).

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah *content analysis*, yaitu dengan melakukan identifikasi pengungkapan CSR pada bank syariah menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR) indeks yang terdiri dari investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, masyarakat, lingkungan hidup, dan tata kelola perusahaan. Prosedur-prosedur untuk menunjang metode analisis isi tersebut sebagai berikut:

1. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai informasi yang terdapat dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia sesuai dengan sub-sub tema ISR yang digunakan.
2. Melakukan penilaian (*scoring*) indeks ISR pada Bank Umum Syariah. *Scoring* dilakukan untuk mencari *point* pengungkapan yang dinilai dengan 1 jika terdapat sub-tema yang diungkapkan dan 0 jika terdapat sub-tema yang tidak diungkapkan dari tema pengungkapan yang telah dijabarkan dalam tabel.
3. Selanjutnya akan dilakukan analisis isi terhadap tiap tema indeks ISR pada setiap Bank Umum Syariah untuk mengetahui tingkat pengungkapan CSR bank syariah. Selanjutnya dilakukan penilaian secara kumulatif indeks ISR pada Bank Umum Syariah (BUS) yang akan menentukan tingkat pengungkapan CSR Bank Umum Syariah (BUS).

4. Untuk memudahkan dalam mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan CSR di Bank Umum Syariah (Zanariyatim dan Sahroni, 2016) maka dilakukan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks ISR} = \frac{\text{Jumlah poin yang di ungkapkan}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100\%$$

5. Setelah melakukan penilaian (*scoring*) atas item-item indeks ISR, maka selanjutnya menentukan predikat tingkat pengungkapan CSR dari masing-masing BUS. Dalam penilaian tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS, akan digunakan pendekatan yang mengacu pada Munawaroh (2007) dalam Gustani et al. (2017) dimana skor pengungkapan dklasifikasikan dalam 4 kategori: Sangat Informatif (80%-100%), Informatif (66%-80%), Kurang Informatif (51%-65%), dan Tidak Informatif (0% - 50%).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Analisis Hasil Penelitian

4.1 Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan setiap Bank Umum Syariah

1. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan oleh pemerintah dan resmi beroperasi pada 1 Mei 1992.

Sampai saat ini, Bank Muamalat memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 ATM Muamalat, lebih dari 110.000 jaringan ATM di Malaysia Electronic Payment (MEPS), serta 120.000 jaringan ATM bersama dan ATM Prima.

Tabel 4.1 Indeks ISR Bank Muamalat Indonesia

No.	Tema ISR	Persentase					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pendanaan dan Investasi	100%	83.33%	66.67%	83.33%	83.33%	83.33%
2	Produk dan Jasa	100%	100%	100%	100%	66.67%	93.33%
3	Karyawan	80.00%	60.00%	80.00%	80.00%	80.00%	76.00%
4	Masyarakat	45.83%	54.17%	75.00%	62.50%	79.17%	63.33%
5	Lingkungan Hidup	42.86%	28.57%	28.57%	28.57%	42.86%	34.29%
6	Tata Kelola Perusahaan	90.00%	90.00%	100%	100%	100%	96.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2014 hingga 2018 Bank Mualamat Indonesia mendapatkan nilai sebesar 74,38%. Hal ini menunjukkan bahawa tingkat pengungkapan Bank Mualamat dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat informatif dan relatif meningkat setiap tahunnya untuk setiap tema ISR.

2. PT. Bank Syariah Mandiri

Bank syariah mandiri berdiri pada tahun 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan dari penggabungan tersebut menetapkan bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSM.

Sampai saat ini, Bank Syariah Mandiri memiliki lebih dari 737 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM.

Tabel 4.2 Indeks ISR Bank Syariah Mandiri

No.	Tema ISR	Persentase					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pendanaan dan Investasi	50.00%	50.00%	100%	66.67%	50.00%	63.33%
2	Produk dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
3	Karyawan	80.00%	60.00%	80.00%	80.00%	80.00%	76.00%
4	Masyarakat	70.83%	79.17%	83.33%	83.33%	91.67%	81.67%
5	Lingkungan Hidup	42.86%	42.86%	42.86%	28.57%	28.57%	37.14%
6	Tata Kelola Perusahaan	100%	90.00%	100%	90.00%	100%	96.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2014 hingga 2018 Bank Syariah Mandiri mendapatkan nilai sebesar 75,69%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat informatif.

3. PT. Bank BRI Syariah Tbk.

Bank BRI Syariah merupakan hasil akuisisi dari Bank Rakyat Indonesia dengan Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008. BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT. Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Sampai saat ini, Bank BRI Syariah telah memiliki kantor pusat yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 24, Jakarta Pusat, terdapat 57 kantor cabang, 215 kantor cabang pembantu, 10 kantor kas, 25 mobil kas keliling, dan terdapat 2209 kantor layanan syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tabel 4.3 Indeks ISR Bank BRI Syariah

No.	Item ISR	Persentase					
		2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
1	Pendanaan dan Investasi	66.67%	66.67%	83.33%	50.00%	66.67%	66.67%
2	Produk dan Jasa	33.33%	33.33%	100%	100%	100%	73.33%
3	Karyawan	40.00%	80.00%	80.00%	40.00%	80.00%	64.00%
4	Masyarakat	58.33%	79.17%	54.17%	87.50%	100%	75.83%
5	Lingkungan Hidup	42.86%	14.29%	71.43%	42.86%	57.14%	45.71%
6	Tata Kelola Perusahaan	90.00%	90.00%	100%	50.00%	100%	86.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2014 hingga 2018 Bank BRI Syariah mendapatkan nilai sebesar 68,59%. Hal

ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank BRI Syariah dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat informatif.

4. PT Bank Syariah Bukopin Tbk.

Bank Syariah Bukopin berawal dari bank umum yaitu PT Bank Persyarikatan Indonesia yang diakuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk. yang kemudian dikembangkan dan dikonversikan menjadi bank syariah. PT Bank Persyarikatan Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990, dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional. Setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia (BI) pada 27 Oktober 2008. Selanjutnya, pada 11 Desember 2008 Perseroan diresmikan oleh M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI periode 2004-2008.

Sampai saat ini, Bank Syariah Bukopin telah memiliki kantor pusat yang beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 55, Jakarta Pusat, terdapat 11 kantor cabang, 7 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 1 mobil kas keliling, dan terdapat 76 kantor layanan syariah yang tersebar diseluruh Indonesia.

Tabel 4.4 Indeks ISR Bank Syariah Bukopin

No.	Item ISR	Persentase					
		2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
1	Pendanaan dan Investasi	33.33%	50.00%	50.00%	33.33%	83.33%	50.00%
2	Produk dan Jasa	66.67%	100%	100%	100%	100%	93.33%
3	Karyawan	60.00%	80.00%	80.00%	60.00%	60.00%	68.00%
4	Masyarakat	66.67%	79.17%	41.67%	58.33%	66.67%	62.50%
5	Lingkungan Hidup	0.00%	42.86%	28.57%	14.29%	0.00%	17.14%
6	Tata Kelola Perusahaan	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2014 hingga 2018 Bank Syariah Bukopin mendapatkan nilai sebesar 63,50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank Syariah Bukopin dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat informatif.

5. PT BNI Syariah Tbk

Bank BNI Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Sampai saat ini, Bank BNI Syariah memiliki 67 Kantor Cabang, 165 Kantor Cabang Pembantu, 8 Kantor Fungsional, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak, 202 Mesin ATM BNI, 20 Payment Point, dan 1500 Outlet.

Tabel 4.5 Indeks ISR Bank BNI Syariah

No.	Item ISR	Persentase					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pendanaan dan Investasi	66.67%	66.67%	83.33%	66.67%	83.33%	73.33%
2	Produk dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Karyawan	80.00%	80.00%	80.00%	100%	100%	88.00%
4	Masyarakat	83.33%	66.67%	91.67%	75.00%	83.33%	80.00%
5	Lingkungan Hidup	0.00%	28.57%	42.86%	42.86%	57.14%	34.29%
6	Tata Kelola Perusahaan	90.00%	100%	100%	100%	100%	98.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2014 hingga 2018 Bank BNI Syariah mendapatkan nilai sebesar 78,94%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank BNI Syariah dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat informatif.

6. PT Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah adalah lembaga perbankan syariah yang berpusat di Jakarta. Bank Mega Sayariah berawal dari anak usaha Asuransi Tugu yaitu PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yang berdiri pada 14 Juli 1990. Pada 2001, bank ini diambil alih CT Corp (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo), pada tanggal 25 Juli 2004 di konversi menjadi Bank Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia disingkat BSMI, lalu resmi beroperasi sebagai bank syariah pada 25 Agustus 2004. Pada tanggal 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah mejadi Bank devisa dan kemudian pada tanggal 8 April 2009 memperoleh izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggara ibadah haji (BPS BPIH).

Tabel 4.6 Indeks ISR Bank Mega Syariah

No.	Item ISR	Persentase					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pendanaan dan Investasi	16.67%	50.00%	83.33%	50.00%	66.67%	53.33%
2	Produk dan Jasa	33.33%	66.67%	100%	100%	100%	80.00%
3	Karyawan	40.00%	40.00%	60.00%	80.00%	80.00%	60.00%
4	Masyarakat	66.67%	75.00%	87.50%	70.83%	91.67%	78.33%
5	Lingkungan Hidup	42.86%	14.29%	28.57%	57.14%	42.86%	37.14%
6	Tata Kelola Perusahaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2014 hingga 2018 Bank Mega Syariah mendapatkan nilai sebesar 68,13%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank Mega Syariah dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat informatif.

7. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Bank Panin Dubai Syariah didirikan di Malang tanggal 8 Januari 1972 dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Bank Panin Dubai Syariah beberapa kali melakukan perubahan nama mulai dari Bank Pasar Bersaudara Djaja, Bank Bersaudara Jaya, Bank Harfa, Bank Panin Syariah dan nama yang sekarang yaitu Bank Panin Dubai Syariah. Bank ini memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Bank Panin Dubai Syariah juga mendapatkan persetujuan menjadi bank devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 8 Desember 2015.

Tabel 4.7 Indeks ISR Bank Panin Dubai Syariah

No.	Item ISR	Persentase					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pendanaan dan Investasi	50.00%	50.00%	50.00%	66.67%	66.67%	56.67%
2	Produk dan Jasa	66.67%	100%	100%	100%	100%	93.33%
3	Karyawan	80.00%	60.00%	80.00%	80.00%	80.00%	76.00%
4	Masyarakat	91.67%	79.17%	70.83%	75.00%	83.33%	80.00%
5	Lingkungan Hidup	28.57%	0.00%	14.29%	28.57%	14.29%	17.14%
6	Tata Kelola Perusahaan	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	100%	92.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2014 hingga 2018 Bank Panin Dubai Syariah mendapatkan nilai sebesar

69,19%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank Panin Dubai Syariah dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat informatif.

8. PT Bank BCA Syariah

Berawal dari akuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) pada tanggal 12 Juni 2009. Dan setelah dilakukan perubahan nama pada tanggal 16 Desember 2009. PT BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 2 Maret 2009.

Bank BCA Syariah hingga saat ini memiliki 66 jaringan cabang yang terdiri dari 13 Kantor Cabang (KC), 14 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 39 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Kediri, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Bekasi, Surabaya, Semarang, Lampung, Banda Aceh Bogor, dan Depok.

Tabel 4.8 Indeks ISR Bank BCA Syariah

No.	Item ISR	Persentase					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pendanaan dan Investasi	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	83.33%	56.67%
2	Produk dan Jasa	100.00%	66.67%	100%	100%	100%	93.33%
3	Karyawan	80.00%	60.00%	80.00%	80.00%	80.00%	76.00%
4	Masyarakat	75.00%	75.00%	66.67%	83.33%	75.00%	75.00%
5	Lingkungan Hidup	0.00%	0.00%	28.57%	28.57%	28.57%	17.14%
6	Tata Kelola Perusahaan	90.00%	90.00%	90.00%	100%	90.00%	92.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2014 hingga 2018 Bank BCA Syariah mendapatkan nilai sebesar 68,36%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank BCA Syariah dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat informatif.

9. PT Victoria Syariah

PT Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%.

Tabel 4.9 Indeks ISR Bank Victoria Syariah

No.	Item ISR	Persentase					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pendanaan dan Investasi	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
2	Produk dan Jasa	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	100%	73.33%
3	Karyawan	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
4	Masyarakat	8.33%	16.67%	8.33%	75.00%	75.00%	36.67%
5	Lingkungan Hidup	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	Tata Kelola Perusahaan	80.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	88.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2014 hingga 2018 Bank Victoria Syariah mendapatkan nilai sebesar 48,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank Victoria Syariah dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat tidak informatif.

10. PT Bank Jawa Barat Banten Syariah

Pendirian Bank Jawa Barat Banten Syariah (BJB Syariah) diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Pada tanggal 6 Mei 2010 Bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Izin Usaha dari Bank Indonesia tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan *cut off* dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal Bank BJB Syariah.

Saat ini, Bank BJB Syariah telah memiliki 8 kantor cabang, 44 kantor cabang pembantu, 54 jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar didaerah Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, serta 49.630 jaringan ATM Bersama.

Tabel 4.10 Indeks ISR Bank Jawa Barat Banten Syariah

No.	Item ISR	Persentase					
		2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
1	Pendanaan dan Investasi	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	33.33%	46.67%
2	Produk dan Jasa	100%	100%	66.67%	66.67%	100.00%	86.67%
3	Karyawan	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	60.00%	44.00%
4	Masyarakat	41.67%	41.67%	50.00%	50.00%	50.00%	46.67%
5	Lingkungan Hidup	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	Tata Kelola Perusahaan	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	100%	92.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2014 hingga 2018 Bank Jawa Barat Banten Syariah mendapatkan nilai sebesar 52,67%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank Jawa Barat Banten Syariah dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat kurang informatif.

11. PT Maybank Syariah Indonesia Tbk

Maybank Syariah Indonesia adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN.

Per 31 Desember 2019. Maybank Indonesia memiliki 374 cabang termasuk cabang Syariah yang tersebar di Indonesia serta salah satu cabang luar negeri (Mumbai, India), 21 Mobil Kas Keliling dan 1.571

ATM termasuk CDM (Cash Deposit Machine) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergantung dalam jaringan ATM Prima, ATM Bersama, ALTO, CIRRUS dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia, Brunei. Hingga Akhir tahun 2019, Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar Rp.110,6 triliun dan memiliki total asset senilai Rp.169,1 triliun.

Tabel 4.11 Indeks ISR Maybank Syariah Indonesia

No.	Item ISR	Persentase					
		2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
1	Pendanaan dan Investasi	33.33%	33.33%	33.33%	50.00%	16.67%	33.33%
2	Produk dan Jasa	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
3	Karyawan	20.00%	20.00%	60.00%	40.00%	60.00%	40.00%
4	Masyarakat	75.00%	66.67%	50.00%	75.00%	75.00%	68.33%
5	Lingkungan Hidup	42.86%	14.29%	0.00%	0.00%	14.29%	14.29%
6	Tata Kelola Perusahaan	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2014 hingga 2018 Maybank Syariah mendapatkan nilai sebesar 52,10%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Maybank Syariah dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat kurang informatif.

12. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dibentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang berpusat di Semarang, menjadi Bank Syariah dan kemudian *spin off* Unit Usaha Syariah BTPN ke Bank Syariah yang baru ini.

Bank Sahabat didirikan pada tahun 1991 dengan lisensi bank non-devisa. Bank BTPN kemudian mengakuisisi 70% saham di Bank Sahabat

pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi Bank Syariah berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 22 Mei 2014. BTPN Syariah menaikkan *Standard Governance Bank* dengan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) pada 8 Mei 2018.

Tabel 4.12 Indeks ISR BTPN Syariah

No.	Item ISR	Persentase					
		2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
1	Pendanaan dan Investasi	66.67%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	53.33%
2	Produk dan Jasa	100%	66.67%	100%	66.67%	100%	86.67%
3	Karyawan	80.00%	80.00%	80.00%	40.00%	100%	76.00%
4	Masyarakat	75.00%	75.00%	41.67%	66.67%	75.00%	66.67%
5	Lingkungan Hidup	0.00%	14.29%	14.29%	14.29%	57.14%	20.00%
6	Tata Kelola Perusahaan	90.00%	90.00%	100%	100%	100%	96.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2014 hingga 2018 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah mendapatkan nilai sebesar 66,44%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat informatif.

4.2 Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Tema Indeks ISR

Pada bagian ini dilakukan analisis yang telah dilakukan dari perhitungan indeks ISR pada 12 BUS sari tahun 2014 sampai 2018. Analisis yang dilakukan kepada setiap tema indeks ISR di tiap-tiap BUS. Tema pengungkapan indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 6 (enam) tema: Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, Tema Lingkungan Hidup, dan Tema Tata

Kelola Perusahaan. Dari setiap tema terdiri dari beberapa sub-tema. Seluruh sub-tema dari masing-masing tema dalam penelitian ini berjumlah 43 (empat puluh tiga) sub-tema. Penentuan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada setiap tema berdasarkan ketentuan predikat kinerja sosial.

1. Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance and Investment Theme*)

Pada tema pendanaan dan investasi Bank Umum Syariah dalam penelitian ini dilakukan dengan penilaian terhadap 6 (enam) sub-tema pengungkapan. Enam sub-tema ini adalah aktivitas mengandung riba, aktivitas mengandung gharar, rincian laporan pengelolaan zakat, kebijakan tentang pembayaran piutang tak tertagih, kebijakan investasi, dan kebijakan pembiayaan. Berikut ini disajikan presentase tingkat pengungkapan indeks ISR tema pendanaan dan investasi pada Umum Syariah.

Tabel 4.13 Tema Pendanaan dan Investasi

NO.	NAMA BANK	PERSENTASE					RATA-RATA
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	PT. BANK MUAMALAT SYARIAH	100%	83.33%	66.67%	83.33%	83.33%	83.33%
2	PT. BANK SYARIAH MANDIRI	50.00%	50.00%	100%	66.67%	50.00%	63.33%
3	PT. BANK BRI SYARIAH	66.67%	66.67%	83.33%	50.00%	66.67%	66.67%
4	PT. BANK SYARIAH BUKOPIN	33.33%	50.00%	50.00%	33.33%	83.33%	50.00%
5	PT. BANK BNI SYARIAH	66.67%	66.67%	83.33%	66.67%	83.33%	73.33%
6	PT. BANK MEGA SYARIAH	16.67%	50.00%	83.33%	50.00%	66.67%	53.33%
7	PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH	50.00%	50.00%	50.00%	66.67%	66.67%	56.67%
8	PT. BANK BCA SYARIAH	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	83.33%	56.67%
9	PT. BANK VICTORIA SYARIAH	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
10	PT. BANK JAWA BARAT BANTEN SYARIAH	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	33.33%	46.67%
11	PT. MAYBANK SYARIAH	33.33%	33.33%	33.33%	50.00%	16.67%	33.33%
12	PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Syariah	66.67%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	53.33%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis pada tema pendanaan dan investasi di atas, menunjukkan bahwa angka tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia dengan total nilai secara keseluruhan sebesar 83,33% sehingga meraih predikat sangat informatif. Sedangkan nilai terendah terdapat pada Maybank Syariah dengan rata-rata nilai secara keseluruhan sebesar 33.33% sehingga mendapatkan predikat tidak

informatif. Namun secara keseluruhan rata-rata kedua belas BUS meraih predikat kurang informatif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran BUS terhadap pelaporan pendanaannya kurang baik.

2. Tema Produk dan Jasa (*Product and Service Theme*)

Pada tema produk dan jasa dalam penelitian ini dilakukan dengan penilaian 3 (tiga) sub-tema pengungkapan. 3 (tiga) sub-tema pengungkapan pada tema ini yaitu status kehalalan dari produk dan jasa, jenis dan definisi dari semua produk dan jasa yang digunakan, dan layanan atas keluhan terhadap nasabah. Berikut persentase tingkat pengungkapan indeks ISR tema produk dan jasa pada Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2018.

Tabel 4.14 Tema Produk dan Jasa

NO.	NAMA BANK	PERSENTASE					RATA-RATA
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	PT. BANK MUAMALAT SYARIAH	100%	100%	100%	100%	66.67%	93.33%
2	PT. BANK SYARIAH MANDIRI	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
3	PT. BANK BRI SYARIAH	33.33%	33.33%	100%	100%	100%	73.33%
4	PT. BANK SYARIAH BUKOPIN	66.67%	100%	100%	100%	100%	93.33%
5	PT. BANK BNI SYARIAH	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
6	PT. BANK MEGA SYARIAH	33.33%	66.67%	100%	100%	100%	80.00%
7	PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH	66.67%	100%	100%	100%	100%	93.33%
8	PT. BANK BCA SYARIAH	100%	66.67%	100%	100%	100%	93.33%
9	PT. BANK VICTORIA SYARIAH	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	100%	73.34%
10	PT. BANK JAWA BARAT BANTEN SYARIAH	100%	100%	66.67%	66.67%	100%	86.67%
11	PT. MAYBANK SYARIAH	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
12	PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL SYARIAH	100%	66.67%	100%	66.67%	100%	86.67%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis pada tema produk dan jasa di atas, menunjukkan bahwa nilai tertinggi diraih oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dengan total nilai secara keseluruhan sebesar 100% sehingga meraih predikat sangat informatif. Sedangkan nilai terendah terdapat pada Maybank Syariah dengan rata-rata nilai secara keseluruhan sebesar 66,67% dengan predikat informatif. Secara keseluruhan rata-rata kedua belas BUS meraih predikat sangat informatif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran BUS terhadap pelaporan produk dan jasa sangat baik.

3. Tema Karyawan (*Employess Theme*)

Pada tema karyawan dalam penelitian ini dilakukan dengan penilaian terhadap 5 (lima) sub-tema pengungkapan. Lima sub-tema pada karyawan yaitu karakteristik karyawan, pendidikan dan pelatihan karyawan, kesempatan yang sama yang diberikan kepada setiap karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, tempat ibadah yang memadai untuk setiap karyawan. Berikut adalah hasil persentase analisis tingkat pengungkapan indeks ISR tema karyawan.

Tabel. 4.15 Tema Karyawan

NO.	NAMA BANK	PERSENTASE					RATA-RATA
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	PT. BANK MUAMALAT SYARIAH	80.00%	60.00%	80.00%	80.00%	80.00%	76.00%
2	PT. BANK SYARIAH MANDIRI	80.00%	60.00%	80.00%	80.00%	80.00%	76.00%
3	PT. BANK BRI SYARIAH	40.00%	80.00%	80.00%	40.00%	80.00%	64.00%
4	PT. BANK SYARIAH BUKOPIN	60.00%	80.00%	80.00%	60.00%	60.00%	68.00%
5	PT. BANK BNI SYARIAH	80.00%	80.00%	80.00%	100%	100%	88.00%
6	PT. BANK MEGA SYARIAH	40.00%	40.00%	60.00%	80.00%	80.00%	60.00%
7	PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH	80.00%	60.00%	80.00%	80.00%	80.00%	76.00%
8	PT. BANK BCA SYARIAH	80.00%	60.00%	80.00%	80.00%	80.00%	76.00%
9	PT. BANK VICTORIA SYARIAH	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
10	PT. BANK JAWA BARAT BANTEN SYARIAH	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	60.00%	44.00%
11	PT. MAYBANK SYARIAH	20.00%	20.00%	60.00%	40.00%	60.00%	40.00%
12	PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL SYARIAH	80.00%	80.00%	80.00%	40.00%	100%	76.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis pada tema karyawan di atas, menunjukkan bahwa angka tertinggi diraih oleh Bank BNI Syariah

dengan total nilai secara keseluruhan sebesar 88,00% sehingga meraih predikat sangat informatif. Sedangkan nilai terendah terdapat pada Bank Victoria Syariah dan Maybank Syariah dengan rata-rata nilai secara keseluruhan sebesar 40,00% sehingga mendapatkan predikat tidak informatif. Secara keseluruhan rata-rata kedua belas BUS meraih predikat informatif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran BUS terhadap pelaporan karyawannya baik.

4. Tema Masyarakat (*Society Theme*)

Pada tema masyarakat dalam penelitian ini dilakukan dengan penilaian terhadap 12 (dua belas) sub-tema pengungkapan. Dua belas sub-tema pada masyarakat yaitu sedekah atau donasi, wakaf, qardhul hasan atau pinjaman kebajikan, sumbangan dari karyawan, pendidikan kepada masyarakat, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kepedulian terhadap anak yatim, pembangunan dan renovasi mesjid, kegiatan kepemudaan, kegiatan sosial lainnya, dan sponsor acara lainnya.. Berikut adalah hasil persentase analisis tingkat pengungkapan indeks ISR tema masyarakat.

Tabel. 4.16 Tema Masyarakat

NO.	NAMA BANK	PERSENTASE					RATA-RATA
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	PT. BANK MUAMALAT SYARIAH	45.83%	54.17%	75.00%	62.50%	79.17%	63.33%
2	PT. BANK SYARIAH MANDIRI	70.83%	79.17%	83.33%	83.33%	91.67%	81.67%
3	PT. BANK BRI SYARIAH	58.33%	79.17%	54.17%	87.50%	100%	75.83%
4	PT. BANK SYARIAH BUKOPIN	66.67%	79.17%	41.67%	58.33%	66.67%	62.50%
5	PT. BANK BNI SYARIAH	83.33%	66.67%	91.67%	75.00%	83.33%	80.00%
6	PT. BANK MEGA SYARIAH	66.67%	75.00%	87.50%	70.83%	91.67%	78.33%
7	PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH	91.67%	79.17%	70.83%	75.00%	83.33%	80.00%
8	PT. BANK BCA SYARIAH	75.00%	75.00%	66.67%	83.33%	75.00%	75.00%
9	PT. BANK VICTORIA SYARIAH	8.33%	16.67%	8.33%	75.00%	75.00%	36.67%
10	PT. BANK JAWA BARAT BANTEN SYARIAH	41.67%	41.67%	50.00%	50.00%	50.00%	46.67%
11	PT. MAYBANK SYARIAH	75.00%	66.67%	50.00%	75.00%	75.00%	68.33%
12	PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL SYARIAH	75.00%	75.00%	41.67%	66.67%	75.00%	66.67%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis pada tema masyarakat di atas, menunjukkan bahwa angka tertinggi diraih oleh Bank Syariah Mandiri dengan total nilai secara keseluruhan sebesar 81,67% sehingga meraih predikat sangat informatif. Sedangkan nilai terendah terdapat pada Bank Victoria Syariah dengan rata-rata nilai secara keseluruhan sebesar 36,67% sehingga mendapatkan predikat tidak informatif. Secara keseluruhan rata-rata kedua belas BUS meraih kurang informatif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran BUS terhadap pelaporan sosialnya (masyarakat) kurang baik.

5. Tema Lingkungan Hidup (*Environment Theme*)

Pada tema lingkungan hidup dalam penelitian ini dilakukan dengan penilaian 7 (tujuh) sub-tema pengungkapan . 7 (tujuh) sub-tema pengungkapan pada tema ini yaitu kampanye *Go Green*, konservasi lingkungan, perlingungan terhadap flora dan fauna, permasalahan polusi, perbaikan dan pembuatan sarana umum, audit lingkungan, dan kebijakan manajemen lingkungan. Berikut persentase tingkat pengungkapan indeks ISR tema lingkungan hidup pada Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2018.

Tabel 4.17 Tema Lingkungan Hidup

NO.	NAMA BANK	PERSENTASE					RATA-RATA
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	PT. BANK MUAMALAT SYARIAH	42.86%	28.57%	28.57%	28.57%	42.86%	34.29%
2	PT. BANK SYARIAH MANDIRI	42.86%	42.86%	42.86%	28.57%	28.57%	37.14%
3	PT. BANK BRI SYARIAH	42.86%	14.29%	71.43%	42.86%	57%	45.72%
4	PT. BANK SYARIAH BUKOPIN	0.00%	42.86%	28.57%	14.29%	0.00%	17.14%
5	PT. BANK BNI SYARIAH	0.00%	28.57%	42.86%	42.86%	57.14%	34.29%
6	PT. BANK MEGA SYARIAH	42.86%	14.29%	28.57%	57.14%	42.86%	37.14%
7	PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH	28.57%	0.00%	14.29%	28.57%	14.29%	17.14%
8	PT. BANK BCA SYARIAH	0.00%	0.00%	28.57%	28.57%	28.57%	17.14%
9	PT. BANK VICTORIA SYARIAH	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	PT. BANK JAWA BARAT BANTEN SYARIAH	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	PT. MAYBANK SYARIAH	42.86%	14.29%	0.00%	0.00%	14.29%	14.29%
12	PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL SYARIAH	0.00%	14.29%	14.29%	14.29%	57.14%	20.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis pada tema lingkungan hidup di atas, menunjukkan bahwa angka tertinggi diraih oleh Bank BRI Syariah dengan total nilai secara keseluruhan sebesar 45,72% sehingga meraih predikat tidak informatif. Sedangkan nilai terendah terdapat pada Bank Victoria Syariah dan Bank Jawa Barat Banten Syariah dengan rata-rata nilai secara keseluruhan sebesar 0,00% sehingga mendapatkan predikat tidak informatif. Secara keseluruhan rata-rata kedua belas BUS meraih tidak informatif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran BUS terhadap pelaporan lingkungannya tidak baik.

6. Tema Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Theme*)

Pada tema tata kelola perusahaan dalam penelitian ini dilakukan dengan penilaian 10 (sepuluh) sub-tema pengungkapan . 10 (sepuluh) sub-tema pengungkapan pada tema ini yaitu pernyataan tentang kepatuhan syariah (DPS), struktur kepemilikan, pendapatan dan penggunaan dana non-halal, kebijakan anti korupsi, kinerja DPS, Rincian nama dan profil DPS, kinerja komisaris, Rincian nama dan profil komisaris, kinerja dewan direksi, Rincian nama dan profil dewan direksi. Berikut persentase tingkat pengungkapan indeks ISR tema lingkungan hidup pada Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2018.

Tabel 4.18 Tema Tata Kelola Perusahaan

NO.	NAMA BANK	PERSENTASE					RATA-RATA
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	PT. BANK MUAMALAT SYARIAH	90.00%	90.00%	100%	100%	100%	96.00%
2	PT. BANK SYARIAH MANDIRI	100%	90.00%	100%	90.00%	100%	96.00%
3	PT. BANK BRI SYARIAH	90.00%	90.00%	100%	50.00%	100%	86.00%
4	PT. BANK SYARIAH BUKOPIN	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
5	PT. BANK BNI SYARIAH	90.00%	100%	100%	100%	100%	98.00%
6	PT. BANK MEGA SYARIAH	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
7	PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	100%	92.00%
8	PT. BANK BCA SYARIAH	90.00%	90.00%	90.00%	100%	90.00%	92.00%
9	PT. BANK VICTORIA SYARIAH	80.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	88.00%
10	PT. BANK JAWA BARAT BANTEN SYARIAH	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	100%	92.00%
11	PT. MAYBANK SYARIAH	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
12	PT. BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL SYARIAH	90.00%	90.00%	100%	100%	100%	96.00%

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis pada tema tata kelola perusahaan di atas, menunjukkan bahwa angka tertinggi diraih oleh Bank Mega Syariah dengan total nilai secara keseluruhan sebesar 100% sehingga meraih predikat sangat informatif. Sedangkan nilai terendah terdapat pada Bank BRI Syariah dengan rata-rata nilai secara keseluruhan sebesar 86,00% sehingga mendapatkan predikat sangat informatif. Secara keseluruhan rata-rata kedua belas BUS meraih sangat informatif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran BUS terhadap pelaporan tata kelola perusahaannya sangat baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau kinerja sosial pada Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* pada tahun 2014-2018, maka kesimpulannya yaitu:

- 5.1.1 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah secara keseluruhan sudah melaporkan tanggung jawab sosialnya. Dalam hal ini Bank umum Syariah menyajikan laporan tahunan (*annual report*) yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Bank.
- 5.1.2 Secara keseluruhan, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah yang dijadikan sebagai objek penelitian jika diukur menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR) cukup baik dan konsisten. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank yang dijadikan objek penelitian bisa dikatakan semakin menyadari pentingnya pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosialnya sesuai prinsip syariah serta telah melaksanakan perannya sebagai perbankan syariah.
- 5.1.3 Tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial Bank Umum Syariah secara keseluruhan terbilang informatif, yakni mencapai 65,93%, walaupun belum mencapai angka sempurna

100% dikarenakan masih ada item-item indeks ISR yang belum diungkapkan secara keseluruhan.

Berdasarkan tema pengungkapan, pengungkapan yang paling banyak diungkapkan adalah tema pendanaan dan investasi, produk dan jasa, tata kelola perusahaan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran bank syariah mengenai tanggung jawab sosial dan status syariah (halal) produk dan jasanya serta kepatuhan, sehingga diungkapkan baik oleh kedua belas Bank Umum Syariah tersebut.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi, yaitu:

- 5.2.1 Tidak semua tema *Islamic Social Reporting* (ISR) sesuai dijadikan tolak ukur dan jika ingin mengetahui lebih jauh kegiatan sosial bank syariah seperti pernyataan tidak ada transaksi yang tidak sesuai syariah, Shadaqah dan Qardhul Hasan, tidak semua bank mengungkapkan hal ini dengan alasan tidak perlu bahkan mereka hal ini tidak relevan untuk dipikirkan dan diungkapkan.
- 5.2.2 Standar Fatwa yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan standar operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS) tiap negara berbeda. Sebagai contoh di Indonesia standar DPS moderat, di Malaysia agak longgar dan justru di Timur Tengah agak ketat. Oleh karena itu jika membandingkan tolak ukur bank syariah antar negara berdasarkan fatwa DPS tentu hasilnya juga akan berbeda.

5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini bagi para peneliti lain yang ingin melakukan kajian ulang terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.3.1 Bagi Bank Syariah

Bagi bank syariah agar terus meningkatkan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* melalui laporan tahunan (*annual report*) atau media komunikasi lainnya. Selain itu isu-isu sosial yang sudah menjadi isu global saat ini, aspek sosial juga merupakan amanah dari agama Islam itu sendiri. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* juga sebagai bentuk upaya meningkatkan kepercayaan *stakeholder* atau publik.

5.3.2 Bagi peneliti selanjutnya

5.3.2.1 Bagi peneliti selanjutnya juga dapat dilakukan perbandingan mengenai praktik tanggung jawab sosial perbankan syariah di negara lain yang berbeda benua dan ideologi seperti Pakistan, Mesir, Singapura, Inggris, Arab Saudi, dan lain-lain. Hasilnya tentu dapat digunakan sebagai perbandingan dan acuan bagi bank syariah untuk lebih baik dan maju dalam perkembangan praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosialnya agar tidak memberikan kesimpulan yang keliru mengenai praktik tanggung jawab sosial perbankan syariah di setiap negara.

5.3.2.2 Bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* bank syariah dengan menggunakan indeks (ISR) hendaknya terus mengembangkan tema-tema indeks ISR sehingga bisa benar-benar relevan untuk diaplikasikan pada bank syariah. Selain itu, peneliti menyarankan sampel yang digunakan bisa selain BUS di Indonesia dan jumlah periode bisa diperbanyak agar hasil penelitian dapat digeneralisir dengan tepat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu-Tapanjeh, A. M. 2009. Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on accounting*, 20(5), 556-567.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2010. *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, AAOIFI.
- Aracil, E. 2019. "Corporate social responsibility of Islamic and conventional banks: The influence of institutions in emerging countries", *International Journal of Emerging Markets*, 14(4), 582-600.
- Baydoun, N., & Willett, R. 2000. Islamic corporate reports. *Abacus*, 36(1), 71-90.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. 1982. *Methods of Social Research*.
- Cosmin, J., & Eugenia, I. I. 2009. Strategies of corporate social responsibility in the European Union. *Analele Universita Ţii Din Oradea*, 175.
- Darrough, M. N., & Russell, T. 2002. A positive model of earnings forecasts: Top down versus bottom up. *The Journal of Business*, 75(1), 127-152.
- Djam'an, S., & Aan, K. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Dusuki, A. W. 2008. What does Islam say about corporate social responsibility. *Review of Islamic economics*, 12(1), 5-28.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. 2007. Maqasid al-Shariah, Maslahah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25.
- Elkington, J. 1997. *Enter The Triple Bottom Line of 21th Century Business*, Capstone: Oxford.
- Emery, D. R., Finnerty, J. D., & Stowe, J. D. 2004. *Corporate financial management*. Prentice Hall.
- Evans, T. G. 2003. *Accounting theory: contemporary accounting issues*. South-Western Pub.
- Fauziah, K., & Yudho, P. 2013. Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks*. *Jurnal Dinamika Akuntansi* , 5(1), 12-20.

- Fitria, S., & Hartanti, D. 2010. Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, 13, 1-46.
- Gray, R., Owen, D., & Maunders, K. 1988. Corporate social reporting: emerging trends in accountability and the social contract. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1(1), 6-20.
- Gustani, 2015, Islamic Social Reporting (ISR) sebagai Model Pelaporan CSR. *Institusi Bisnis Syariah, STIE SEBI*.
- Gustani, G., & Bayinah, A. N. 2017. Model Pelaporan Kinerja Sosial Perbankan Syariah: Implementasi Islamic Social Reporting Index (Indek ISR) di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(1), 35-49.
- Hackston, D., & Milne, M. J. 1996. Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. *Accounting, auditing & accountability journal*, 9(1), 77-108.
- Hadi, Nor. 2011. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hameed, S. 2007. IFRS vs AAOIFI: the clash of standards?. *Retrieved December, 10, 2016*.
- Haniffa, R. 2002. Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective. *Indonesian Management and Accounting Journal*, 1(2), 128–146.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. 2004. *Disclosure practices of Islamic financial institutions: An exploratory study*. Bradford University School of Management.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. 2007. Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of business Ethics*, 76(1), 97-116.
- Hendriksen, E. S., & Van Breda, M. F. 1992. Accounting Theory, Richard D. Irwin Inc., Chicago.
- Ismayanti, N. F. 2015. Akuntansi corporate social responsibility (csr) pada bank syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1-24.
- Junaidi, J. 2015. Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Index. *Journal of Accounting and Investment*, 16(1), 75-85.

- Kamla, R., & Rammal, H. G. 2013. Social reporting by Islamic banks: does social justice matter?. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(6), 911-945.
- Karim, A. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Khurshid, M. A., Al-Aali, A., Soliman, A. A., & Amin, S. M. 2014. Developing an Islamic corporate social responsibility model (ICSR). *Competitiveness Review: An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness*, 24(4), 258-274.
- Kolbe, R. H., & Burnett, M. S. 1991. Content-analysis research: An examination of applications with directives for improving research reliability and objectivity. *Journal of consumer research*, 18(2), 243-250.
- Korten, D. C. 2007. *The great turning: From empire to earth community*. Berrett-Koehler Publishers.
- Lako, A. 2010. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan: Motif, Perlakuan Akuntansi dan Bukti Empiris. *Manajemen & Usahawan Indonesia*, (1).
- M Ikhsan, P., H Nashruddin, B., Condro, H. D., Triono, S. P., & Ag, M. 2017. Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah Di Indonesia (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. 2006. Social reporting by Islamic banks. *Abacus*, 42(2), 266-289.
- Mathews, M. R. 1995. Social and environmental accounting: A practical demonstration of ethical concern?. *Journal of Business Ethics*, 14(8), 663-671.
- Merina, C. I., & Verawaty, V. 2016. Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Perusahaan Go Publik Yang Liasting Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal MBiA*, 15(2), 71-84.
- Moleong, J. 2009. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 107-108.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2007. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, R. 2008. *Akuntansi keuangan syariah: konsep dan implementasi PSAK syariah*. Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Othman, R., & Thani, A. M. 2010. Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 9(4), 135-144.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. 2009. Determinants of Islamic social reporting among top Shariah-approved companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12(10), 4-20.
- PT. Bank BCA Syariah. (t.thn). *Laporan Tahunan Periode 2014-2018*, www.bcasyariah.co.id
- PT. Bank BNI Syariah. (t.thn). *Laporan Tahunan Periode 2014-2018*, www.bnisyariah.co.id
- PT. Bank Mega Syariah Indonesia. (t.thn). *Laporan Tahunan Periode 2014-2018*, www.megasyariah.co.id
- PT. Bank BRI Syariah. (t.thn). *Laporan Tahunan Periode 2014-2018*, www.brisyariah.co.id
- PT. Bank Jawa Barat Banten Syariah. (t.thn). *Laporan Tahunan Periode 2014-2018*, www.bankbjb.co.id
- PT. Bank Mandiri Syariah. (t.thn). *Laporan Tahunan Periode 2014-2018*, www.mandirisyariah.co.id
- PT. Bank Muamalat Indonesia. (t.thn). *Laporan Tahunan Periode 2014-2018*, www.bankmuamalat.co.id
- PT. Bank Panin Dubai Syariah. (t.thn). *Laporan Tahunan Periode 2014-2018*, www.paninbanksyariah.co.id
- PT. Bank Syariah Bukopin. (t.thn). *Laporan Tahunan Periode 2014-2018*, www.syariahbukopin.co.id
- PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. (t.thn). *Laporan Tahunan Periode 2014-2018*, www.btpnsyariah.com
- PT. Bank Victoria Syariah. (t.thn). *Laporan Tahunan Periode 2014-2018*, www.bankvictoriasyariah.co.id/

- PT. Maybank Syariah. (t.thn). *Laporan Tahunan Periode 2014-2018*, www.maybank.co.id
- Raditya, A. N. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perusahaan Yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES). *Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology*, 23(12), 1047–1052.
- Rakhiemah, A. N., & Agustia, D. 2009. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap corporate social responsibility (CSR) disclosure dan kinerja finansial perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XII*, 4-6.
- Rama, A. 2014. Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 2355-0228.
- Rokhlinasari, S. 2016. Teori-teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 7(1), 1-11.
- Said, R., Zainuddin, Y., & Haron, H. 2009. The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212–226.
- Saridona, R., & Cahyandito, M. F. 2015. Social performance of Indonesia Islamic banking: analysis of Islamic social reporting index. In *International Conference on Economics and Banking (Vol. 1, pp. 194-200)*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2016. *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Sembiring, E. R. 2003. Kinerja Keuangan, Political Visibility, Ketergantungan pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya*, (1), 249-259.
- Sembiring, E. R. 2005. Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial: study empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. *MAKSI*, 6(1), 69-85.
- Simanjuntak, B. H., & Widiastuti, L. 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 7(3), 351–366.

- Sofyani, H., Ulum, I., Syam, D., & Wahjuni, S. 2012. Islamic social reporting index sebagai model pengukuran kinerja sosial perbankan syariah (studi komparasi Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(1), 36-46.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Cetakan*, 11, 23-26.
- Sulaiman, M. 2001. Testing a model of Islamic corporate financial reports: some experimental evidence. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 9(2), 115-139.
- Sulistyowati, Firma. 2004. Pengungkapan Kinerja Sosial: Wujud Pertanggungjawaban Perusahaan Kepada Publik. *Antisipasi*, 8(1), 66-86.
- Suwardjono. 2013. Teori Akuntansi Perakayasaan Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPF. 2020 (p. 583).
- Syahnaz, M. 2013. Pengaruh CSR terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1(2), 1-14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
- Wibisono, Y. 2007. *Corporate Social Responsibility: Membedah Konsep dan Aplikasi*, FASCHO Publishing : Gresik.
- Zanariyatim, A., & Bayinah, A. N. 2016. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 85-103.